

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Penulis UI
TEMA : Memastikan Kedaulatan Rakyat
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari **Kamis** Tanggal 3 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 6 Kolom 2-5

RINGKASAN:

Rocky Gerung (Pengajar Filsafat FIB UI dan Pendiri SETARA Institute), menulis tentang perlindungan hak warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan seperti diatur dalam UUD 45. Prinsip negara berdasarkan kedaulatan rakyat mengesampingkan kedaulatan Tuhan yang berlaku bagi umat beragama yang berbeda-beda untuk mencegah terjadinya konflik. Negara bertugas menjamin hak bergama setiap warga negara dengan tidak mencampuri segala sesuatu yang menjadi isi keyakinan tersebut. Untuk menyeimbangkan distribusi hak-hak sosial-politik, maka negara secara *deliberatif* harus melindungi mereka yang "minoritas dan "marjinal", agar tetap mendapat haknya sesuai kehidupan publik yang normal.

CATATAN :

Handwritten mark

Memastikan Kedaulatan Rakyat

Oleh ROCKY GERUNG

Tahukah negara di mana alamat "Surga" dan berapa nomor telepon "Neraka"? Berhakkah negara menentukan "akhirat" seseorang? Berbagai forum evaluasi akhir tahun 2007 tentang kebebasan beragama di negeri ini tiba pada kesimpulan yang sama: Negara gagal melindungi hak warga negara menjalankan agama/kepercayaannya!

Mengapa pemerintah lalai melindungi warganya? Apakah di negeri ini ada dua jenis warga negara? Ada warga negara yang "benar" dan ada yang "sesat"?

Pasal 28E UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, beribadat menurut agamanya, dan meyakini kepercayaannya. Kita juga telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB sehingga menjadi hukum positif kita. Pasal 18 Ayat 2 Kovenan itu berbunyi: "Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."

Urusan hati nurani

Prinsip-prinsip kebebasan beragama/kepercayaan itu sebetulnya sudah kita tuntaskan dalam

debat-debat penyusunan UUD di masa lalu, yaitu ketika kita memilih untuk menjalankan negara ini dengan prinsip "kedaulatan rakyat". Kita tidak memilih kedaulatan "Tuhan" karena kita tidak ingin menjadikan "hal yang amat tinggi" itu diturunkan dan direndahkan dalam pertenggaran politik. Tuhan (dan ayat sucinya) adalah urusan hati nurani, bukan urusan negara.

Filosofinya terang-benderang: di dalam politik segala sesuatu harus dapat diuji dan dipertanyakan, sedangkan tentang Tuhan tak seorang pun sanggup mengujinya. Itulah sebabnya politik berubah secara periodik, tetapi kita tidak mungkin menyangkal piktada untuk memillhi Tuhan. Tidak ada kon-testas untuk Tuhan karena kedaulatan Tuhan abadi dalam nurani pemeluknya. Prinsip inilah yang disebut pandangan sekuler.

Pandangan sekuler bukan pandangan anti-agama. Justru demi menghormati status "suci", "misteri", dan "misteri" dari Tuhan, negara tidak boleh merasa tahu tentang hati nurani warganya. Dengan kata lain, negara tidak boleh berpendapat tentang "isi ajaran" suatu agama/kepercayaan. Tugas negara hanyalah menjamin "hak meyakini" suatu agama/kepercayaan sebagai hak asasi dan tidak boleh ikut campur dalam soal doktrin atau isi keyakinan itu.

Jika isi ajaran suatu agama

hukum" dan "yang melanggar hukum".

Negara wajib membedakan antara koruptor dan pembayar pajak, antara perusak harta benda orang dan pewarta demokrasi. Tapi, negara tidak boleh membedakan warga negara berdasarkan banyaknya jumlah penganut agama. Bukankah sebelum para tamu pembawa agama-agama besar tiba di Nusantara sudah ber-mukim terlebih dahulu berbagai agama asli sang tuan rumah? Karena itu, tidaklah layak bila negara justru mendukung klasifikasi baru antara mayoritas-minoritas, dengan berbagai akibat diskriminatifnya secara sosial dan administratif.

Pelajaran toleransi

"Memilih demokrasi berarti menghitung orang semesta-mata dari titik pusat konstitusi dan bukan dengan ukuran-ukuran adikodrati. Bahkan untuk menyeimbangkan distribusi hak-hak sosial-politik, negara secara delib-eratif harus melindungi mereka yang "minoritas" dan "marjinal" agar mereka tidak terhalang oleh statusnya itu untuk memperoleh akses ke dalam kehidupan publik yang normal. Negara melindungi golongan ini bukan karena mereka minoritas dalam agamanya, tapi karena kondisi minoritasnya secara sosial itu dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pencapaian keadilan sosial-politik.

Kegagapan pemerintah meng-

ucapkan ketegasan dalam soal di atas justru menjadi peluang bagus bagi para perusak toleransi untuk menggagalkan upaya konsolidasi demokrasi. Memang ada situasi global yang ikut melatari pendalaman fanatisme di dalam negeri. Begitu juga obsesi-obsesi politik identitas masih kuat mengendap dalam pikiran sebagian elite. Tetapi, pilihannya adalah menolerir intoleransi atau bergerak dalam garis lurus kemajemukan.

Kita telah memilih sebuah Indonesia yang majemuk. Dan memang hanya dalam kondisi itu kita dapat melanjutkan kemanusiaan yang mulia esa dan mempraktikkan ketuhanan yang adil dan beradab.

ROCKY GERUNG
*Pengajar Filsafat FIB-UI,
Pendiri SETARA Institute*

POJOK

Pada dua pekan terakhir 2007 pencairan anggaran melonjak.

Kok, seperti cuci gudang!

Kekerasan jangan sampai jadi bagian permainan politik.

Democracy... pakai uang, keras lagi!

Kanis 3 m 2008 Vol 6 ke 1 2-5